

Ben Urip Tetep Semeleh
Dinamika Pemuda Kelompok Banyumili Dusun Gadingsari
Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang

Ciptaningrat Larastiti *)

ABSTRAK

Artikel ini berupaya untuk mengulas keseharian hidup pemuda kelompok Banyumili yang berada di dusun Gadingsari, desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Secara turun menurun, sebagian besar masyarakat dusun Gadingsari menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kondisi alam dusun Gadingsari yang subur menjadikan wilayah ini menjadi salah satu basis pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Magelang. Sebagian besar wilayah dusun Gadingsari merupakan lahan pertanian produktif. Di sisi lain, kondisi ini tak lantas membuat masyarakat dusun Gadingsari lepas dari himpitan ekonomi. Sebagian besar masyarakat dusun Gadingsari hidup dibawah garis kemiskinan. Hampir 90% petani di dusun Gadingsari merupakan petani penggarap. Sejauh ini lahan produktif hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian masyarakat saja. Persoalan lain terkait pengelolaan sektor pertanian adalah intervensi modal investor hortikultura dari Korea Selatan yang membuat kondisi sosial ekonomi petani penggarap semakin terpuruk. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya arus urbanisasi yang dilakukan masyarakat dusun Gadingsari. Ditengah tingginya arus urbanisasi, pemuda melalui kelompok Banyumili hadir membangun sumber ekonomi alternatif di desa dengan mengembangkan budaya ikan lele menggunakan terpal. Sejak berdiri pada tahun 2010, tercatat 16 orang pemuda sudah menjadi anggota kelompok ini. Selain diyakini strategi alternatif pengelolaan lahan tidak produktif seperti pekarangan rumah, budidaya ikan lele menggunakan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dusun Gadingsari. Kata kunci : *kelompok Banyumili, pemuda, pengelolaan lahan, budidaya lele*

ABSTRACT

This article attempts to describe the experience of everyday life of the Banyumili youth group in Gadingsari, Mangunsari village, Sawangan subdistrict, Magelang. Having been passed down from one generation to the next, most of the people of the Gadingsari village depend on the agricultural sector for their livelihoods. The naturally fertile conditions in Gadingsari mean it is a base for the development of the agricultural sector in Magelang Regency. Most of Gadingsari is productive agricultural land. Despite land fertility, Gadingsari still suffers from economic pressures. Most of the Gadingsari inhabitants live under the poverty line. Almost 90% of farmers in Gadingsari are farmers. To date, the highly productive land can only be accessed by some sections of society. Another related issue is the intervention of horticultural investors from South Korea which further

* Penerima Hibah Riset Studi Kepemudaan (HRSK) dari YouSure untuk Kategori Yuniior. Ciptaningrat Larastiti adalah peneliti pada Sajogyo Institute (Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria) di Bogor.

deteriorates socio-economic conditions for the farmers. This has large implications on the urbanization of Gadingsari. Amid the high urbanization, youth groups, namely Banyumili, have built an alternative economic source in the village by developing a method for cultivating catfish using tarpaulin. Since its establishment in 2010, sixteen people have become members of this group. Besides being seen as an alternative strategy which uses non-productive land, catfish cultivation is also expected to improve the economic welfare of Gadingsari inhabitants.

Keywords: Banyumili group, youth, land management, catfish cultivate

PENDAHULUAN

Dusun Gadingsari Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang merupakan kampung yang terletak di lereng Gunung Merbabu dan Merapi. Daerah ini kaya akan air, bahkan bercocoktanam padi pun bisa dilakukan tiga kali dalam setahun. Air yang berlimpah juga menjamin mata pencaharian lain seperti budidaya ikan tawar. Pada bulan April dan Mei, saat musim membara tanah karena hama, masyarakat akan memanfaatkan sawah menjadi tambak ikan. Lalu sisa bulan yang lain akan ditanami padi.

Melimpahnya air di Gadingsari tidaklah sepadan dengan kesejahteraan petani di sana. Kesenjangan jumlah kepemilikan tanah menjadi persoalan utama bagi petani Gadingsari. Karmin (70), petani Gadingsari, menyebutkan bahwa kurang lebih 90% petani Gadingsari adalah petani penggarap. Petani penggarap ini sama artinya dengan petani gurem yang hanya memiliki lahan sebesar 1 *kesuk* (1000 m²) hingga 4 *kesuk* (4000 m²). Karena jumlah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka para petani gurem akan menggarap tanah dari minoritas petani yang memiliki luasan sawah lebih banyak.

Menjelang masa tanam, petani gurem akan menghubungi pemilik tanah untuk menyewa lahan. *Nembung*, demikian istilahnya. Mereka berbondong-bondong mencari lahan yang bisa disewa atau digarap. Maka perkara kepercayaan menjadi penting

di sini. Scott melihat gejala itu sebagai relasi patron-klien yang berlandaskan norma untuk memberikan keamanan dasar patron kepada klien (Scott, 1993: 13). Pengertian “keamanan” itu dimaknai sebagai subsistensi petani gurem agar mampu melangsungkan hidupnya sehari-hari. Relasi demikian juga terjadi di Dusun Gadingsari, berikut bentuk kesepakatan antara petani gurem dan petani pemilik tanah.

Kompromi (lihat Tabel 1) tidaklah bersifat baku. Kesepakatan tersebut bisa berubah sesuai dengan cara petani menanggapi jamannya. Sayangnya, penyesuaian itu acap kali kurang menguntungkan bagi petani gurem. Biaya produksi yang tinggi bersanding dengan pembagian hasil panen membuat para petani merasa keberatan. Kondisi itulah yang menjadi pangkal bagi pemuda untuk memandang resah masa depannya di desa.

Kesulitan mengakses tanah juga diterima oleh Rahmadi (35), salah satu pemuda Gadingsari. Ia menyebutkan bahwa pemuda di Gadingsari hanya bisa memperoleh sawah bila mereka sudah menikah. Kalaupun mereka ingin pergi ke sawah, statusnya hanya membantu budidaya padi milik orangtuanya. Kesulitan lain juga terjadi karena para petani pemilik tanah enggan untuk menyewakan sawahnya ke pemuda. Kesulitan mengakses tanah juga diperparah dengan kehadiran petani investor di Gadingsari. Petani gurem harus bersaing dengan kompetitor kaya yang telah meningkatkan biaya sewa tanah.

Tabel 1.
Pembagian kerja antara pemilik tanah dan petani penggarap pada sistem bagi hasil

| | <i>Maron (1/2)</i> | <i>Pertelon (1/3)</i> |
|-------------------------|---|---|
| Pemilik tanah | Setengah dari pajak tanah ditanggung oleh pemilik tanah Mendapatkan setengah dari hasil pertanian | Seluruh pajak tanah ditanggung oleh pemilik tanah Mendapatkan dua pertiga dari hasil pertanian Biaya produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida ditanggung oleh pemilik tanah |
| Petani penggarap | Setengah dari pajak tanah ditanggung oleh petani penggarap Mendapatkan setengah dari hasil pertanian Biaya produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida dan tenaga ditanggung oleh petani penggarap | Mendapatkan sepertiga dari hasil pertanian Hanya menyediakan tenaga. |

Tak sedikit para pemuda Gadingsari, karena lemahnya akses faktor produksi di desa, memilih untuk pergi ke kota. Usai lepas dari bangku sekolah menengah, para pemuda akan mengisi kantong-kantong industri di Semarang, Surabaya hingga Tangerang. Mereka juga beralih ke kota, seperti Yogyakarta dan Magelang, untuk menjadi karyawan toko. Bagi pemuda di Gadingsari, perpindahan itu seolah menjadi keniscayaan.

Dinamika pemuda Gadingsari tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Jawa. Aras urbanisasi menjadi hal lazim. "*Pemuda di sini hampir setengahnya merantau,*" tutur Fathoni (30). Menjadi buruh dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi pemuda Gadingsari untuk mengatasi kesulitan ekonominya.

Fenomena tersebut sempat diungkapkan oleh Ben White dalam sebuah kesempatan di Seminar YouSure UGM pada 20 Januari 2012. Ia menyebutkan bahwa persoalan pemuda yang ingin menjadi petani terletak pada *corporate and urban land grabbing; internal differentiation processes; delays in inter-generational transfer of land* (White, 2012). Kondisi itu cukup terangkum di fenomena Gadingsari. Pemuda Gadingsari berhadapan dengan pengambilan area persawahan yang dilakukan oleh investor. Kompetitor kaya itu mendesak pemilik

tanah untuk menyewakan lahannya dengan biaya sewa tinggi. Di Gadingsari, perusahaan benih hortikultura PT. Oriental Seed telah mengambil dua hektar tanah untuk lokasi pembenihan.

Selain intervensi modal dari investor hortikultura dari Korea Selatan, sejak awal masyarakat Gadingsari sudah mengalami kesenjangan kepemilikan tanah yang tinggi. Lahan luas nan produktif terkonsentrasi di beberapa orang saja. Segelintir pihak ini bisa memiliki lahan seluas 1-5 Ha, sementara petani lain hanya memiliki 1000 m² - 4000 m² saja. Diferensiasi lahan tersebut melahirkan ketergantungan petani penggarap kepada petani pemilik. Sementara petani gurem kian terdesak oleh kepemilikan lahan yang kian terfragmentasi akibat warisan (Scott, 1993: 35). Dari waktu ke waktu, anak petani gurem akan berhadapan dengan kenyataan bahwa suatu saat nanti lahan mereka semakin sempit.

Pemuda Gadingsari juga berhadapan dengan realitas budaya di Jawa. Persoalan kedewasaan ini berhubungan dengan tingkat kepercayaan pemilik tanah untuk menyewakan lahannya. Sementara tanah-tanah sempit milik orang tua mereka yang merupakan petani penggarap tentu saja masih dikerjakan sendiri. Selagi masih hidup dan kuat mengerjakan sawah, maka lahan itu tidak akan beralih menjadi milik



Gambar 1:

Area persawahan Gadingsari yang disewa oleh PT. Oriental Seed. Keterbatasan lahan menjadi tantangan yang nyata bagi pemuda di desa. (dok. Sofwan Hadi)

pemuda. Seperti kisah dari Gogo (35), salah satu pemuda Gadingsari yang masih membujang, yang baru mendapatkan hak kelola sawah setelah bapaknya meninggal.

Tantangan tersebut berkelindan dalam keseharian para pemuda di Dusun Gadingsari Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Hari ini, seolah menjadi teramat naif bila membayangkan desa sebagai arena pemuda untuk mandiri. Oleh karenanya studi ini bertujuan untuk melihat kemungkinan pemuda Gadingsari membuat arena produktif di desa disaat sumber daya tanah dikontrol oleh orang tua dan pemilik tanah yang juga representasi petani tua. Pertanyaannya kemudian, bagaimana peran pemuda Gadingsari untuk membangun sumber ekonomi alternatif di desa?

BERADA DI PERSIMPANGAN

Karmin (70) susah menelusuri jejak kepemilikan tanah keluarganya yang tak

pernah bertambah. Sejak lampau, tanah sepanjang 1,5 kilometer di samping kiri jalan menuju Dusun Gadingsari hanya dimiliki satu keluarga saja. Walau hal itu bisa diperdepatkan kembali, namun kesenjangan kepemilikan tanah itu tetap ada. Umumnya, para petani di Dusun Gadingsari hanya memiliki 1.000 m² hingga 4.000 m². Karena terlampau sempit maka para petani gurem akan menyewa sawah milik orang lain yang kemudian akan digarap sendiri bersama keluarganya.

Bagi Bernstein, luas tanah tersebut menggambarkan karakter *peasant*. Disebut demikian karena terminologi ini menyiratkan pada pengorganisasian lahan dan tenaga kerja keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Bernstein, 2010: 03). Keterbatasan kepemilikan faktor produksi pada petani seperti Karmin membuat mereka tidak mampu mengakumulasi modal. Keluarga pun menjadi unit produksi untuk melakukan budidaya pertanian.

“Small commodity producers whose farms are worked with family (or household) labour without the employment of wage labour.” (Bernstein, 2010: 93).

Pada kondisi tersebut, pemuda yang merupakan anak petani diposisikan sebagai tenaga kerja. Anak-anak petani diikutsertakan untuk membantu penggarapan tanah orang tua mereka yang memang hanya cukup dikerjakan sendiri.

Lemahnya posisi petani gurem kian diperparah oleh proses komodifikasi pertanian. Bernstein memberi penekanan pada proses perubahan desa dari *natural economy*¹ menjadi sekadar obyek pasar dan negara yang membuat kondisi petani semakin runyam². Dari hari ke hari kebutuhan di luar subsistensi rumah tangga petani semakin beragam. Bernstein mengategorikannya menjadi dua. Pertama, *upstream*, merujuk pada kebutuhan untuk menjaga proses produksi tetap berlangsung seperti tenaga kerja, benih, pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya (Bernstein, 2010: 65). Kedua, *downstream*, faktor-faktor di luar proses produksi pertanian seperti pemasaran hasil panen dan pengeluaran-pengeluaran rumah tangga petani (Bernstein, 2010: 65).

Revolusi Hijau menjadi titik tolak bagi proses kooptasi pasar dalam pemenuhan kebutuhan produksi petani (*upstream*). Sekilas program itu membantu petani, namun dampak lebih jauh justru membuat petani gurem semakin marjinal. Keterpurukan itu

bermula ketika para petani gurem dengan kepemilikan lahan sekitar 1.000 m² harus menanggung biaya benih, pupuk hingga pestisida hama. Petani gurem pun kian tergantung pada sarana produksi pertanian yang dijual oleh industri pertanian.

Sementara di arena persawahan, masih dalam konteks *upstream*, hubungan patron-klien petani gurem dengan petani pemilik tanah harus terganjal oleh kontestasi lahan. Para petani gurem di Dusun Gadingsari harus berhadapan dengan penyewa tanah bermodal besar. Padahal hubungan patron-klien dengan pemilik tanah menentukan batas aman kebutuhan pangan petani setiap hari. Pada kasus Karmin, ia tak mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarganya jika hanya mengandalkan 1.000 m² tanah miliknya. Maka Karmin harus menyewa tanah kepada petani patron kurang lebih seluas 2.000 m². Kini proses tawar menawar antara petani gurem dengan pemilik tanah tak lagi semulus dahulu.

Keterasingan petani juga kian terhimpit oleh faktor lain tentang kebutuhan mereka di luar lingkungan produksi (*downstream*). Misal, seperti yang diyakini oleh Bernstein, ketika petani gurem mengenal uang maka sejak itulah mereka tergabung dalam rejim kapital. Kebutuhan rumah tangga petani semakin besar sementara penghasilan dari sawah tak kunjung bertambah. Keterpojokan itulah yang membuat petani gurem tak pernah mampu mengakumulasi modalnya (Nurtjahyo, 2005: 79).

Gambaran di atas menjadi laku sehari-hari pemuda anak petani Dusun Gadingsari. Hingga pada titik tertentu, mereka memutuskan untuk menjadi karyawan dan buruh dari pada bekerja di desa. Proses proletarisasi pun terjadi. Berduyun-duyun pemuda anak petani bertandang ke kota meninggalkan sawah yang kini tak kalah kompetitif.

Keputusan para pemuda bukanlah tanpa sebab. Ada konstruksi kultural dan struk-

1 *Natural economy* merupakan formasi sosial yang memproduksi barang sesuai dengan nilai-guna yang dimiliki barang tersebut. Akan tetapi Bernstein menggarisbawahi bahwa *natural economy* ini tidaklah mengucilkan pertukaran barang. (Bernstein, 1977: 61).

2 Bernstein (1977) menyebutkan bahwa perusakan terhadap *natural economy* petani sudah terjadi semenjak penetrasi modal. Artinya semenjak pemerintahan kolonial di mana tanaman subsisten petani berganti dengan tanaman komoditas, sejak itulah proses perusakan terjadi. Persoalan petani semakin rumit seiring diperkenalkannya uang di tengah-tengah kebutuhan mereka.

tural yang membuat mereka kesulitan untuk bertahan di desa. Oleh karena itu penulis ingin memandang pemuda sebagai bagian dari *cultural position*.

“In a given culture, preadolescent individuals may count as youth, while those in their 30s or 40s may also be included in this category,” (Bucholtz, 2002: 526).

Berikut penulis mencoba mengurai konstruksi dan tantangan pemuda di Jawa.

Melalui buku “Pahlawan-pahlawan Belia; Keluarga Indonesia dalam Politik”, Saya Sasaki Siraishi mencoba mengupas secara lugas tentang konstruksi pemuda di Indonesia. Ada urusan politis yang membuat pengertian mengenai pemuda berubah. Sejak rejim Orde Baru (Orba), makna pemuda memang sengaja dilemahkan secara politik melalui konsep *familiisme*³. Oleh birokrat Orba, konsep tersebut mewujud dalam hubungan tunggal bapak dan anak semata.

Pada dekade itu kata pemuda mengalami depolitisasi menjadi remaja yang digambarkan sebagai gerombolan orang tidak matang –bukan dewasa, bukan pula anak-anak- (Siraishi, 2001; Naafs dan White, 2012). Dalam hubungan *familiisme*, konsep pemuda harus diseragamkan menjadi anak-besar (remaja). Sebab bagi bapak, si anak-besar dianggap belum bisa bertanggungjawabkan keputusannya di depan orang tua serta masyarakat.

Depolitisasi pemuda itu juga beranjak dari konstruksi kultural anak muda di Jawa. Beranjak dari Bucholtz, Jawa memiliki pemahaman pemuda sebagai anak besar yang tak lepas dari konsepsi mengenai dewasa melalui pernikahan. Dengan pernikahan maka si anak besar akan membangun keluarga *somah* baru. Semenjak itu pula si anak besar akan mene-

rima warisan dari orang tua untuk meneruskan hidup. Hildred Geertz, penulis *The Javanese Family*, hanya menguraikan konsep remaja sebagai pengganti pemuda di Jawa. Para remaja akan tumbuh menjadi dewasa bila mereka sudah menikah.

Pada masyarakat Jawa, anggapan tentang *dewasa* menjadi penting untuk melihat akses faktor produksi di lingkungan keluarga dan sosialnya. Desa di Jawa mengenal sistem pewarisan untuk anak-anak yang beranjak dewasa atau sudah menikah. Demikian pula dengan Dusun Gadingsari, para orang tua akan mewariskan sawah untuk sumber penghasilan, serta pekarangan untuk membangun rumah. Bila tidak, anak-anak petani di desa mendapatkan aset produktif bila orang tua sudah tidak mampu lagi mengolah sawah.

Walau demikian ada sekelompok pemuda di Dusun Gadingsari yang ingin lepas dari kecenderungan proletarisasi itu. Bila sawah yang selama ini dianggap sebagai sentral, maka pemuda Gadingsari justru memanfaatkan pekarangan untuk membangun alternatif ekonomi di desa.

Pekarangan merupakan *home garden* (Soemarwoto dkk, 1987: 88). Di desa, letak pekarangan selalu lekat dengan tempat bermukim para petani. Sayangnya keberadaan pekarangan masih dianggap sebagai lahan sampingan. Kadang pekarangan hanya diisi oleh pohon yang berbuah tiap musim. Tak jarang, pekarangan hanya dianggurkan saja dan menjadi tempat sampah.

Beranjak dari pengalaman itu maka Kelompok Banyumili mencoba untuk memanfaatkan pekarangan dengan cara lain. Para pemuda yang tergabung dalam kelompok itu mencoba untuk mengubah konsep umum mengenai pekarangan menjadi lahan produksi. Keterbatasan akses sawah bagi petani penggarap sekaligus anak-anaknya lah yang menjadi faktor penentu. Selain itu besarnya biaya produksi

3 Lihat Saya Sasaki Siraishi (2001).

untuk budidaya pertanian membuat para pemuda berpikir lain.

Kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya lain di sekitar desa tentu tidak sepenuhnya berlaku bagi pemuda yang lain. Sebagian besar dari mereka justru memilih untuk merantau. Namun tidak demikian dengan anggota Kelompok Banyumili. Pilihan tersebut seolah menjadi sikap bagi pemuda untuk lepas dari hegemoni yang menghimpit lingkungan petani. Dalam tulisan ini pemuda diletakkan sebagai “... *a potential source of cultural resistance*” (Griffin dalam Margono, 2011: 08). Oleh karenanya seperti berada di persimpangan, anggota kelompok mencoba memainkan perannya untuk mengembangkan potensi ekonomi alternatif di desa. Harapannya kedepan, mereka mampu menjadi masa depan pertanian di Indonesia.

“...there is a generation of rural youth who want to be the world’s future small-holder farmers. If not, then of course small-farmerist proponents have no argument against a future agriculture based on large-scale corporate industrial farming.” (Naafs dan White, 2012: 12)

BEN URIP TETEP SEMELEH⁴

Rumah Fathoni (30) tampak begitu ramai oleh beberapa pemuda yang duduk di balai bambu depan rumahnya. Disusul kemudian datang satu motor yang membawa dua pemuda dari Kampung Sewuan di Dusun Dukun Kabupaten Magelang. Kedatangan mereka disambut hangat oleh empat pemuda lainnya. Kemudian ibu Fathoni mempersilahkan teman-teman Fathoni untuk masuk ke dalam ruang tamu.

Di atas meja tamu, sudah tersedia aneka kudapan yang terisi di toples, kopi, teh, gula dan termos air panas. Tak ketinggalan satu pula *krat* gelas belimbing yang menandakan

bahwa si pemilik rumah sering kedatangan tamu.

Tanpa rasa canggung beberapa diantara mereka, seperti Rahmadi (35) langsung membuat teh sendiri. Perbincangan pun mengalir. Salah satu topik cerita yang menarik bagi mereka adalah budidaya ikan lele. Kini lele menjadi primadona untuk menghasilkan uang bagi pemuda di Gadingsari.

Fathoni mulai berkisah tentang perjalanan hidupnya. Sebagaimana wajarnya pemuda di Gadingsari, Fathoni juga pernah merantau ke luar daerah sebelum memutuskan untuk kembali ke desa. Pada 1995 Fathoni menginjak kaki di Solo untuk menempuh studi Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS). Sembari kuliah dia turut aktif di sebuah lembaga bantuan hukum (LBH). Usai berstatus sarjana, ia mulai mencoba peruntungan lain dengan berwirausaha dalam bidang percetakan sekaligus bekerja di LBH. Namun, usaha yang dirintisnya ini tidak bisa bertahan lama karena bangkrut. Hingga pada 2009 ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, Gadingsari, Mangunsari. “*Wis kesel, (sudah lelah) mas,*” katanya. Sebagai seorang pemuda, Fathoni tidak betah bekerja dalam rutinitas.

Sekembalinya di Gadingsari, ia mencoba untuk memulai usaha budidaya dan pembibitan lele. Pertama kali memulai usaha ini, Fathoni hanya mempunyai dua bidang kolam terpal ukuran 2 x 3 meter dan 3 x 4 meter serta meminjam dua pasang indukan. Pertama kali merintis usaha budidaya dan pembibitan lele di Gadingsari, Fathoni pernah diremehkan oleh para “pemain tua”. Mereka itu, menurut Fathoni, merupakan orang-orang yang sudah pernah melakoni usaha budidaya ikan tawar sebelumnya. Para “pemain tua” menganggap usaha budidaya yang dilakoni Fathoni terlalu berisiko. Maklum, belum pernah ada budidaya lele di Gadingsari yang berhasil. Sebab lele

4 Agar hidup tetap nyaman.

merupakan jenis ikan air tawar terkenal rentan terkena penyakit karena tergantung terhadap kondisi cuaca.

Hanya saja Fathoni tak mudah terma-kan omongan orang. Kemauan yang kuat mendorongnya untuk belajar cara-cara budidaya dan pembibitan ikan lele. Kini, di pekarangan samping rumahnya sudah terdapat 25 buah kolam terpal. Minat usaha Fathoni ini kemudian diikuti beberapa pe-muda lain di kampungnya. Sembari menu-tup kisahnya, walau belum maksimal ia merasa senang bisa kembali ke desa.

Di Dusun Gadingsari, Fathoni tidaklah sendiri. Ada sosok seorang anak dari petani penggarap yang juga memilih cara sama untuk menghabiskan masa mudanya di desa. Rahmadi (35) namanya. Sejak SMP Rahmadi sudah menaruh perhatiannya pada pertanian. Hal itu cukup jarang sebab tak semua pemuda Gadingsari memiliki minat di bidang pertanian. Pertanian dianggap belum mampu memberi keuntungan prag-matis yang berlimpah. Salah satu penyebabnya adalah timpangnya jumlah kepemilikan lahan di Gadingsari. Para petani Gadingsari adalah petani penggarap dengan padi se-bagai komoditas utamanya. Biasanya me-reka melakukan pertanian bagi-hasil seperti *maron* dan *pertelon*. Sistem tersebut lah yang dianggap tidak menguntungkan di mata pemuda.

Oleh karenanya banyak pemuda se-usia Rahmadi memilih untuk merantau dan melakukan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan pemasukan secara rutin. Se-perti halnya pemuda lain, Rahmadi pun pernah meninggalkan desa untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Selain menjadi buruh di luar desa. Di era 2000-an, banyak pemuda terserap menjadi buruh bangunan karena terkonsentrasi pada pembangunan Pondok Gontor yang terletak di pinggir kampung Gadingsari. Usai penggarapan pondok, para pemuda pun tak kehilangan akal untuk mencari pekerjaan lain. Bila

sawah tidak menguntungkan, maka mereka pun mencari kredit untuk motor lalu mulai mencari uang menjadi pengojek para santri Pondok Gontor. Sementara lainnya banyak yang merantau menjadi karyawan toko, buruh bangunan atau bahkan menganggur.

Di saat teman-teman lainnya memilih untuk merantau, Rahmadi justru mencoba untuk optimis terhadap sektor pertanian. Bila budidaya padi dianggap tidak meng-untungkan, maka kelimpahan air di dae-rahnya ia manfaatkan untuk tambak ikan nila. Pada pertengahan tahun 2004, pe-muda lulusan sekolah menengah pertama itu masih memanfaatkan musim *uritan*, peralihan antara musim panen ke musim tanam, untuk budidaya ikan. “Saat itu *ber-main ikan* dilakukan untuk penyela benih padi saja, dari pada tanah nganggur. *Kan sayang,*” ucap Rahmadi. Di waktu yang lain, ia akan membantu bapaknya di sawah.

Merasa belum puas, maka pada tahun 2007 ia pun mulai meyewa tanah sendiri. Berbekal tabungan dan rasa percaya pe-milik tanah akan ketekunannya, ia pun mulai memberanikan diri mengelola sawah. Saat itu ia menyewa tanah seluas 1.000 m², dengan biaya Rp 200.000,00 per tahun, untuk dibuat usaha budidaya ikan nila. Ia membeli larva ikan nila berukuran 1 cm, kemudian di besarkan hingga memiliki panjang 7 cm (*glondong*). Lantas ikan nilai sepanjang 7 cm itulah yang akan dikirim ke waduk-waduk besar seperti Waduk Gajah Mungkur atau Waduk Kedungombo.

Budidaya tersebut merupakan respons Rahmadi melihat ketidakuntungan bila para petani penggarap hanya melakukan per-tanian padi konvensional. Umumnya para petani penggarap hanya memanfaatkan musim *uritan* saja untuk budidaya ikan. Bagi Rahmadi, pertanian konvensional tidak akan menguntungkan petani sebab antara beban produksi dengan hasil yang diperoleh tidaklah menguntungkan. Untuk petani yang menggarap 1.000 m², akan



Gambar 2:

Rahmadi (35) sedang membicarakan pengalamannya di Kelompok Banyumili dilatarbelakangi oleh area persawahan Dusun Gadingsari

memperoleh padi seberat 4 kwintal. Jumlah tersebut akan dibagi separuhnya kepada pemilik tanah, maka petani penggarap hanya akan memperoleh 2 kwintal saja. Padahal selain mengusahakan tenaga, baik tenaga pribadi atau buruh, para petani penggarap juga harus menanggung biaya produksi. Biaya tersebut digunakan untuk membeli pupuk hingga pestisida.

Atas latar belakang itulah maka Rahmadi memilih untuk memanfaatkan tanah sebagai budidaya ikan. Sayangnya usaha Rahmadi tersebut terhalang biaya sewa yang selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2007, ia hanya perlu mengeluarkan dana sebesar Rp 600.000,00 untuk satu petak tanah seluas 1.000 m². Pada tahun 2009 meningkat hingga Rp. 1.000.000,00 per 1.000 m². Selain peningkatan biaya sewa, bencana erupsi Gunung Merapi pada akhir tahun 2010 menjadi puncak kegagalan usaha Rahmadi. 2.000 ikan nila yang ia sebar di kolam ikan mati karena abu vulkanik. Rahmadi pun merugi. Ia tidak

bisa mengupayakan modal lagi karena biaya sewa tanah semakin meningkat. Ia harus mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp. 1.300.000,00 per tahun. Menurut Rahmadi, salah satu penyebab peningkatan biaya sewa tersebut adalah investor asing yang mulai masuk di Mangunsari pada tahun 2007.

Meskipun demikian, merantau bukanlah pilihan utama. Salah satunya yang dilakukan oleh Rahmadi. "Kerja sebagai petani itu berat. Kerjanya nggak sebersih kalau kerja kantoran. Tapi jadi tani, saya lebih *semeleh* (tenang dan nyaman) karena tidak diatur-aturl orang, hasilnya pun cukup," tutur Rahmadi sembari memandang sawah yang terhampar di samping kampungnya.

GEROMBOLAN PARA PEMUDA

Sekembalinya di kampung halaman pada 2009 lalu, Fathoni memulai usahanya untuk budidaya benih lele. Di awal usaha, ia mencari berbagai informasi mengenai

cara budidaya lele dari media internet. Dari sana Fathoni mengetahui bahwa kondisi alam di Dusun Gadingsari memang cocok digunakan untuk budidaya pembenihan ikan lele.

Selain faktor suhu di Dusun Gadingsari, bagi Fathoni, budidaya lele juga bisa dianggap sebagai upayanya untuk memanfaatkan lahan tidak produktif. Umumnya perkampungan di Jawa ditandai oleh halaman luas di sekitar rumah-rumah. Halaman tersebut biasa disebut sebagai tanah pekarangan. Lahan itu dimanfaatkan untuk ditanami pohon-pohon seperti pohon mangga, rambutan, nangka, pohon pisang hingga pohon kelapa.

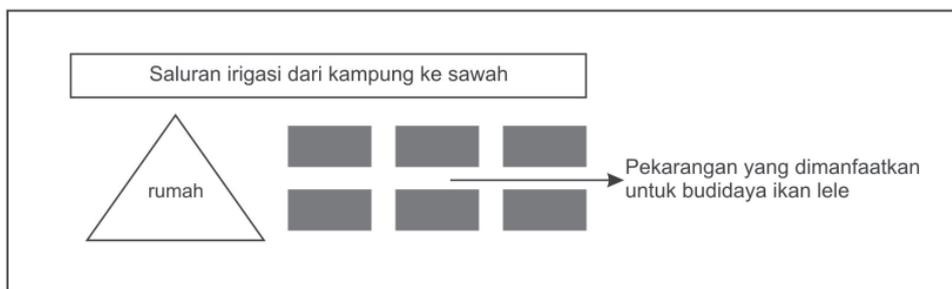
Bagi Fathoni, pemanfaatan pekarangan yang ala kadarnya itu dianggap kurang menguntungkan. Menurutnya, para petani Gadingsari hanya mendapatkan pemasukan dari pekarangan setiap satu tahun sekali. Itu pun dengan hasil yang musiman. Bila musim mangga, maka akan panen mangga. Akibatnya uang yang diperoleh dari pemanfaatan pekarangan hanya dianggap sebagai sampingan semata.

Selama ini petani penggarap masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan hasil dari sawah. Padahal kesenjangan kepemilikan lahan sawah cukup tinggi. Memahami kondisi itu, maka Fathoni pun mencoba untuk memanfaatkan pekarangan untuk arena yang lebih produktif. Disamping itu, proses budidaya lele di pekarangan rumah dirasa lebih meng-

untungkan dari pada di sawah. *“Ikan lele rentan terkena penyakit, lebih mudah untuk mengontrol ikan bila ada di pekarangan,”* sambung Fathoni. Dalam hal ini, alumnus UNS itu mencoba untuk mengoptimalkan pekarangan sebagai bagian dari satuan produksi desa (Soemarwoto dll, 1987: 166).

Maka muncullah ide untuk membuat kolam sederhana dari terpal. Rahmadi, salah satu anggota Kelompok Banyumili, juga mengakui bahwa pengetahuan budidaya dan pembibitan lele tidak sekali jadi. Pada proses belajar itu, ia dan pemuda yang lain belajar di daerah Bojong dan Blondo Kecamatan Mungkid, Magelang. Di daerah tersebut, mereka melihat proses pembuatan kolam sederhana dari terpal. *“Sakdrunge survei mrono gawene terpal asal-asalan wae mas” [“sebelum survei kesana kolam terpal dibuat asal jadi],”* ujarnya. Setelah melihat proses pembuatan di Mungkid, mereka mendapatkan pengetahuan tentang teknis pembuatan kolam terpal yang meliputi sistem pembuangan air dan kemiringan tanah/kolam. *“Sekarang justru lebih besar daripada di sana, hehe,”* ungkapnya.

Hanya dalam satu tahun, usaha budidaya dan pembibitan lele ini berhasil menjadi primadona baru di Dusun Gadingsari. Usaha ini dinilai mudah dan cepat sehingga mampu membuat pemuda di sekitar Desa Mangunsari tertarik untuk mencobanya. Usaha ini pun dianggap menguntungkan, dengan modal untuk pembuatan kolam dari terpal senilai Rp 630.000 untuk sembilan



kolam. Kolam ini bisa bertahan antara 1-2 tahun. Untuk biaya pakan, jika bibit dijual pada usia 20 hari (*rete*) total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 345.000,-. Jadi katakanlah biaya awal yang dibutuhkan sampai bibit bisa dijual adalah Rp. 975.000.

Walau mulai memiliki pesaing karena banyak pemuda di daerahnya meniru usaha budidaya bibit ikan lele di pekarangan. Fathoni tidaklah kecewa, ia tidak merasa takut bahwa harga yang ia tawarkan ke pedagang akan berkompetisi dengan yang lain. Melalui ini, ia justru melihat potensi untuk mengorganisir diri bersama pemuda yang lain. Dengan berkelompok, para pemuda Gadingsari bisa memiliki nilai tawar tentang harga lele di pasaran.

Kelompok Banyumili resmi terbentuk pada 2010 dengan jenis usaha adalah budidaya pembibitan ikan lele di kolam terpal. Tercatat ada 16 orang yang menjadi anggota dengan rentang usia antara 20-40 tahun. Dari jumlah tersebut, hanya delapan orang saja yang aktif. Minggu, 28 Oktober 2012, peneliti mewawancarai Fathoni, ketua Kelompok Banyumili. Fathoni pulalah yang pertama kali memulai usaha budidaya dan pembibitan lele di kolam

terpal. Keberhasilannya dalam mengelola usaha ini diikuti oleh beberapa pemuda lain di Gedangsari. Dalam rentang waktu dua tahun, kelompok Banyumili sudah berkembang dan mampu memasarkan bibit lele dari para anggotanya sampai ke Imogiri, Bantul, Wates, hingga Boyolali.

Sebelum Banyumili, di Gadingsari pernah ada kelompok mina tani Sumber Mina. Menurut Fathoni, meskipun ada, kelompok ini sudah tidak aktif. "*Kebanyakan anggotanya orang-orang tua,*" ujarnya. Fathoni juga melanjutkan, "*Dulu sebelum membuat Banyumili diminta atau ditawari untuk meregenerasi Kelompok Sumber Mina. Tapi kami tidak mau dan lebih memilih membuat kelompok baru.*" Alasannya sederhana, bahwa mereka ingin membangun nalar berkelompok sendiri yang jauh dari ketergantungan terhadap orang tua.

Oleh karenanya Kelompok Banyumili lahir sebagai wadah ekonomi produktif pemuda di Dusun Gadingsari Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan. Tidak seperti kelompok para orang-orang tua, Kelompok Banyumili justru memanfaatkan lahan pekarangan untuk dibuat kolam-kolam terpal. Menurut Fathoni, biasanya

Tabel 2:
Kalkulasi Modal Pembuatan Pembibitan Lele

| No | Pengeluaran | Besaran |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Terpal ukuran 3 x 4 m : Rp 70.000,- (bisa dipakai hingga 2 tahun) | 9 x 70.000 = Rp 630.000,- |
| 2 | Pakan (kebutuhan untuk usia sampai 20 hari) | |
| a. | 5 galon Cacing @50.000,- | Rp 250.000,- |
| b. | 5 kg Tepung/ denol halus, @ 15.000,- | Rp 75.000,- |
| c. | 5 kg Tepung/ denol kasar, @ 14.000,- | Rp 60.000,- |
| | Lebih dari 20 hari | |
| d. | 10 kg PF 800 | Rp 250.000,- |
| e. | 10 kg PF 1000 | Rp 250.000,- |
| f. | 20 kg T 81-1 | Rp 200.000,- |
| | Total | Rp 1.715.000,- |

pekarangan oleh masyarakat hanya dimanfaatkan untuk tanaman buah seperti rambutan dan pisang. Disamping membutuhkan waktu yang agak lama—kadang sampai satu tahun—hasilnya pun tak seberapa. “*Rambutan itu kalau ditebaske [diborongkan hasilnya] paling hanya dapat 200-300 ribu rupiah,*” ujarnya. sedangkan untuk budidaya pembibitan ia dan anggota lainnya bisa menghasilkan rata-rata 50.000 ekor bibit lele setiap bulannya. Sedangkan harga satu ekor lele ukuran 4-6 cm atau satu sampai satu setengah bulan sebesar Rp 90,-. Jadi bisa dihitung, satu bulan Fathoni dan anggota yang lain bisa mendapatkan penghasilan kotor rata-rata Rp. 4.500.000.

Rahmadi juga memberikan gambaran tentang usaha dan budidaya pembibitan lele yang dilakukannya. Di halaman rumahnya ia memiliki sembilan kolam yang terdiri dari empat kolam ukuran 3 x 4 meter dan lima kolam ukuran 2 x 3 meter. Jumlah tersebut, menurutnya masih terbatas. Sebab, menurutnya, satu indukan saja bisa menghasilkan bibit antara 80.000-100.000 ekor. “Jumlah itu atau kalau satu indukan netes, (semua kolam) *full,*” ujarnya. Sehingga dalam proses pembibitan ia selalu mempertimbangkan kondisi kolamnya.

Dari modal tersebut, para pemuda Gadingsari bisa menjual harga lele dengan daftar harga yang disepakati. Tabel 3 merupakan hasil kesepakatan dari Kelompok Banyumili.

Tabel 3:
Daftar Harga Lele Kelompok Banyumili

| No | Ukuran | Usia | Harga Jual |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1. | 1-1,5 cm atau Rete | 20 hari | Rp 10,- |
| 2. | 2-3 cm | 20-25 hari | Rp 25,- |
| 3 | 3-5 cm | 25-30 hari | Rp 60,- |
| 4 | 4-6 cm | 1,5 bulan | Rp 90,- |
| 5 | 5-7cm | 1,5 bulan | Rp 130,- |
| 6 | 7-9 cm | 2 bulan | Rp 200,- |

Rahmadi dan Fathoni menjelaskan, bila dibuat rata-rata maka satu indukan bisa menghasilkan bibit sebanyak 100.000 ekor. Jika, Rahmadi bisa menjual bibit lele ukuran 3-5 cm saja, ia bisa memperoleh penghasilan kotor Rp 6.000.000,-. Artinya, gambaran penghasilan bersih yang bisa diperoleh adalah Rp 4.285.000,- dalam waktu satu bulan. Ini gambaran saja, meskipun kenyataannya, dari 100.000 bibit tidak semua mempunyai ukuran yang sama. Artinya, dari satu kali proses pembibitan ukuran bisa bermacam-macam. “*Kan rebutan saat dikasih makan. Yang menang bisa makan banyak dan ukurannya lebih besar. Kalau yang kalah, ukurannya lebih kecil,*” terangnya.

Soal siapa yang menentukan harga, Rahmadi menjawab kelompok lah yang menentukan. Rahmadi menyebutnya sebagai *harga kontrak*. Artinya, harga ditentukan oleh kelompok dan berlaku untuk para anggota. Jadi harga tidak ditentukan oleh pasar atau tengkulak. Perubahan harga sangat ditentukan oleh harga pakan. Ketika harga naik, kelompok akan mencari perbandingan dengan harga di tempat lain. Dua hal tersebut menjadi pertimbangan kelompok dalam mengubah harga. “*Selama ini kenaikan harga berkisar antara Rp 10,- sampai dengan Rp 20,- per ekornya,*” jelas Rahmadi.

Rahmadi mengaku permintaan bibit lele sangat besar. Faktor ini pulalah yang turut mengangkat posisi tawar petani. Sebab, tidak sulit bagi petani untuk menjual bibit lele. Hampir setiap minggu, pasti datang pembeli. Sehingga apabila satu pembeli tidak cocok dengan harga yang ditetapkan petani, masih banyak pembeli lainnya yang siap membeli bibit lele.

Kebanyakan pembeli lah yang datang ke petani. Menurut Rahmadi, dalam melayani pembeli, kesepakatan harga ditentukan di awal. Apabila harga sudah disepakati, pembeli akan datang di hari



Gambar 3:

Fathoni (kanan) sedang memberi makan ikan sembari menemani pembeli (kiri) di pekarangan rumah yang ia buat tambak ikan lele.

berikutnya untuk mengambil bibit. *"Harga harus dimatengke [dimatangkan] di depan, kalau nggak cocok nggak masalah karena ikan masih di kolam dan pasti akan ada yang nyari. Kalau harga sudah cocok, baru ikan dipilih sesuai ukuran,"* terangnya.

Keberadaan Kelompok Banyumili dinilai oleh anggotanya cukup menguntungkan. Walaupun bertajuk *kelompok*, namun tidak serta merta membuat relasi antar anggota menjadi kaku. Justru sebaliknya, kelompok dikelola dengan atmosfer yang cair. Tidak ada pertemuan formal rutin yang diagendakan. Meskipun demikian, relasi dan interaksi berjalan terus menerus. Seperti pengalaman berikut ini.

Waktu itu ada seorang pembeli yang datang menanyakan bibit ukuran 4 x 6 cm. Kebetulan saja, bibit lele milik Rahmadi belum lama sudah laku dibeli. Kemudian, ia menyarankan untuk melihat kolam Fathoni. Sama dengan kolam Rahmadi, bibit lele di tempat Fathoni pun tidak ada. Pembeli

kemudian diajak untuk melihat kolam milik salah satu anggota yang lain. Waktu itu, pemilik kolam sedang tidak ada di rumah. Namun, bukan berarti proses jual beli tidak bisa dilakukan. Pembeli dilayani oleh Fathoni, meskipun bukan dia pemiliknya. Dan akhirnya harga disepakati dan proses jual beli dilaksanakan. Kemudian saya bertanya apa nanti pemilik tidak marah atau minimal tersinggung? Dan anda kan bisa mencarikan sendiri dan keuntungannya bisa anda ambil. *"Tidak mas, cukup saya SMS saja pemiliknya, kan harganya sama, dan di sini hal seperti tadi sudah biasa. Ya saling tolong menolong, kalau pemiliknya tidak ada bisa dijual oleh yang lain. Nanti uangnya tinggal dikasihkan,"* jawabnya.

Keberadaan kelompok yang cukup cair juga membuat ide tentang pembibitan lele menyebar hingga masyarakat di lain dusun. Berawal dari erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Waktu itu, banyak pengungsi dari lereng Merapi seperti Sewukan dan Se-

wukan Tegal mengungsi di Gadingsari. Saat terjadi erupsi merapi, para pemuda Gadingsari bersama-sama menjadi relawan kemanusiaan. “Untuk urusan kemanusiaan, para pemuda bergerak tanpa perlu menunggu komando,” ujar Pras, Ketua Gapoktan “Mumpuni” Mangunsari. Selain membantu proses evakuasi, warga Gadingsari pada khususnya menyediakan tempat tinggal dan konsumsi bagi para pengungsi. Menurut Pras, tempat pengungsian di Gadingsari bersifat mandiri dan pernah dicap “ilegal” oleh aparat desa. Sebelumnya, para pengungsi ditempatkan di kantor Kecamatan dan Koramil Sawangan. “Di kantor kecamatan dan koramil, pengungsi tidak memiliki kegiatan. Mereka hanya menunggu makanan datang dan sering bergerombol di pinggir jalan,” tutur Pras. Melihat kondisi ini, para pemuda Gadingsari mengajak para pengungsi untuk pindah.

Dalam membantu pengungsi, pemuda Gadingsari tidak hanya mengurus urusan logistik semata. Mereka pun mengajak para pengungsi untuk berkegiatan. Salah satunya mengenalkan usaha budidaya dan pembibitan lele. Interaksi tidak hanya bersifat searah. Para pengungsi dari lereng merapi pun mengenalkan budidaya holtikultura berupa sayur mayur. Setelah suasana bencana berlalu hubungan antara warga lereng Merapi dengan Gading-sari tetap berlanjut sampai dalam hal pertukaran komoditas. Sekarang ini warga lereng merapi, seperti Sewukan dan Sewukan Tegal sudah mengembangkan budidaya dan pembibitan lele yang turut dipasarkan melalui kelompok Banyumili. Di samping itu, warga di lereng merapi juga menyediakan benih holtikultura untuk ditanam di Gadingsari.

Harko merupakan salah satu Warga Sewukan I yang turut mengembangkan usaha pembibitan ikan lele di kolam terpal. Erupsi Merapi 2010 telah menghilangkan

gantungan hidup keluarganya selama ini. Lahan sawah warisan orang tuanya yang berada di pinggir Sungai Tlingsing hilang disapu gelombang lahar dingin. “Lemahe ilang, saiki dadi kali [tanahnya hilang sekarang jadi sungai],” ujarnya. Hilangnya tanah juga berarti hilangnya pekerjaan. Setelah berkenalan dengan Fathoni, ia beralih pekerjaan dengan mengembangkan usaha pembibitan ikan lele di pekarangan salah seorang keluarganya. “Untuk kolam, meminjam pekarangan *paklik* (paman),” tambahnya. Kini di Sewukan sudah berdiri lembaga serupa dengan Kelompok Banyumili yakni kelompok perikanan Tirta Merapi.

Membaca dinamika Kelompok Banyumili seolah menyiratkan rasa lega pada masa depan pemuda di desa. Paling tidak kehadiran mereka menjadi angin segar di antara rangkaian proses proletarisasi yang tengah menggenjalah. Walau tidak menjangkau semua pemuda di Dusun Gading-sari, keberadaan inovasi usaha pembibitan lele mampu menjadi alternatif ekonomi agar tidak selamanya menjadi buruh di kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bucholtz, Mary. 2002. “Youth and Cultural Practice” dalam *Annual Review of Anthropology* Vol 31.
- Bernstein, Henry. “Notes on Capital and Peasantry” dalam *Review of African Political Economy* No 10.
- _____. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change: Agrarian Change and Peasant Studies*. Kanada: Fernwood Publishing
- Geertz, Hildred. 1985. *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT. Temprint
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Margono, Agus M. 2011. "Pemuda dan Transformasi Pasca Orde Baru" dalam *Pemuda Pasca Orde Baru: Potret Kontemporer Pemuda Indonesia*. Yogyakarta: YouSure
- Mulyanto, Dede. 2011. *Antropologi Marx: Karl Marx tentang Masyarakat dan Kebudayaan*. Bandung: Penerbit Buku Ulitimus.
- Naafs, Suzanne dan Ben White. 2012. "Intermediate Generations: Reflections on Indonesian Youth Studies" dalam *The Asia Pasific Journal of Anthropology Vol 13 No. 1*.
- Noertjahyo, JA. 2005. *Dari Ladang sampai Kabinet: Menggugat Nasib Petani*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Patnaik, AK. 2004. "Gramsci's Today" dalam *Economic and Political Weekly Vol. 39 No. 11*
- Roberts, B.R. 1990. "Peasants and Proletarians" dalam *Annual Review of Sociology Vol 16*.
- Soemarwoto, Otto dkk. 1987. "Pekarangan Rumah Di Jawa: Suatu Ekosistem Pertanian Terpadu" dalam *Ekofarming Bertani Selaras Alam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siraishi, S. Saya. 2009. *Pahlawan-pahlawan Belia Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Nalar
- Scott, James. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan IKAPI DKI